

PENGARUH IMPLEMENTASI DAN PENGAWASAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA INSPEKTORAT DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013

Febby Akbar

Program Pascasarjana, Universitas Swadaya Gunung Jati

Email: haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v5i1.10958

Diterima: Agustus 2020; Direvisi: September 2020; Dipublikasikan: Oktober 2020

ABSTRAK

Efektivitas peninjauan terhadap laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu independensi Inspektorat Daerah sebagai pelaksana reviu dan kompetensi pegawai Inspektorat dalam memahami serta menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Namun, terdapat faktor lain yang mempengaruhi efektivitas tinjauan, yakni pengawasan serta implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh simultan antara implementasi dan pengawasan terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reviu terhadap laporan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013.

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode survei eksplanatori (explanatory survey) yang dilengkapi dengan analisis jalur (Path Analysis) dan didukung oleh kajian pustaka (bibliografis). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas, yaitu implementasi (X1) dan pengawasan (X2), serta satu variabel terikat, yaitu efektivitas kinerja reviu (Y). Populasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berfungsi sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada bulan April tahun 2013 terdiri dari 60 individu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Data penelitian yang akan dianalisis terlebih dahulu akan ditransformasi menggunakan Metode Interval Berurutan. Uji hipotesis yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dilakukan dengan menerapkan uji F. Untuk melakukan pengujian secara parsial, digunakan uji t. Sebelum melaksanakan uji hipotesis, terlebih dahulu perlu dilakukan uji prasyarat analisis, yang mencakup pengujian normalitas sebaran dan uji homogenitas varians.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja inspektorat dalam mereviu laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh implementasi dan pengawasan sistem akuntansi keuangan daerah. Dampak implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat diukur dengan nilai

sebesar 26,7%. Pengaruh pengawasan terhadap pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah diketahui mencapai 43,4%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja inspektorat dalam meninjau laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel implementasi dan pengawasan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 70,1%.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Review Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Good Governance merupakan isu yang paling prominent dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas di berbagai sektor publik. Komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme telah diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui ketetapan Nomor. . . Undang-Undang No. XI/MPR/1998 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi agenda penting yang harus diimplementasikan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui proses konsolidasi yang mengintegrasikan laporan keuangan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan laporan ini dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dihasilkan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur. Penyusunan LKPD ini disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dijelaskan secara lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Dalam Pedoman Pelaksanaan Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diatur bahwa Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, hasil dari tinjauan tersebut menjadi landasan pertimbangan bagi Bupati dalam menyusun pernyataan tanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ruang lingkup tinjauan ini mencakup penilaian yang terarah terhadap keandalan sistem pengendalian intern serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan.

Fenomena yang terjadi dalam konteks pelaksanaan reviu mencakup dua aspek yang saling berhubungan, yaitu aspek sistem dan aspek individu. Dari sudut pandang sistem, Inspektorat Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap kemandirian dalam pelaksanaan tugasnya, karena inspektorat tersebut memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Apabila terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kepala daerah melalui kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka peran Inspektorat dalam melaporkan hasil temuan tersebut

menjadi sangat terbatas. Dari sudut pandang individu, pegawai Inspektorat Daerah menunjukkan kelemahan dalam hal wawasan dan pemahaman. Wawasan dan pemahaman yang kurang memadai mengenai proses pelaksanaan audit internal mengakibatkan pelaksanaan audit internal tidak dilaksanakan dengan cara yang sesuai. Selain itu, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara pelaporan dan sistem akuntansi keuangan daerah. Kesalahan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh implementasi dan pengawasan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam meninjau laporan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013.

1. Kajian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

Masisi (1978), Glynn (1993) dalam Mardiasmo (2002:147-148) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan meliputi:

- a. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.
- b. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (*timing of recognition*).
- c. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas.
- d. Menghitung pengaruh masing-

masing operasi

2. Pengawasan

Saefullah (2006: 318) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan suatu upaya sistematis yang meliputi penetapan standar kinerja serta berbagai tujuan yang telah direncanakan. Hal ini mencakup perancangan sistem informasi untuk umpan balik, perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan, identifikasi adanya penyimpangan serta penilaian tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut. Selanjutnya, tindakan yang diperlukan akan diambil guna memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan, sebagaimana diuraikan oleh Handyaningrat (2001: 144), dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal
2. Pengawasan eksternal terhadap organisasi
3. Pengawasan Preventif
4. Pengawasan Represif

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang telah ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, mencakup:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan revidu terhadap laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan kepada Presiden.
2. Menteri Keuangan, dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum negara, bertanggung jawab untuk menetapkan standar revidu terhadap laporan keuangan. Standar tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan revidu yang

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, dengan penekanan pada jaminan kualitas (quality assurance).

3. Aparat pengawasan intern pemerintah, yang dalam hal ini mencakup Inspektorat Jenderal atau lembaga sejenis yang menjalankan fungsi pengawasan internal, bertanggung jawab untuk melakukan reviu terhadap laporan keuangan kementerian negara atau lembaga. Proses ini harus diselesaikan sebelum laporan tersebut disampaikan oleh menteri atau pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
4. Inspektorat provinsi melaksanakan telaah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum laporan tersebut disampaikan oleh gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Inspektorat kabupaten/kota melakukan tinjauan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

3. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Reviu merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah. Tujuan dari reviu ini adalah untuk memberikan tingkat keyakinan yang terbatas bahwa proses akuntansi telah dilaksanakan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku di instansi terkait, serta bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hendaklah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Nomor 24 Tahun 2005

mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan ketentuan terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), proses ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mengacu pada konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tinjauan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan jaminan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan tersebut sebelum disampaikan kepada pihak inspektorat.

Ruang lingkup tinjauan ini terbatas pada analisis laporan keuangan dan catatan akuntansi. Sasaran dari tinjauan ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Mustofa Kamal (2012:2), untuk mencapai tujuan dari suatu reviu, yang meliputi penilaian terhadap keandalan informasi dan/atau keyakinan yang terbatas, dapat diterapkan sejumlah teknik, yaitu penelusuran angka, permintaan keterangan, dan analisis. Dalam rangka mencapai tujuan audit, yaitu memperoleh keyakinan yang memadai, diperlukan penerapan teknik audit yang sesuai dengan jenis audit yang dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 57 Ayat (5), Menteri Keuangan, sebagai Bendahara Umum Negara, memiliki kewenangan untuk menetapkan standar reviu terhadap laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis jalur (Path Analysis), yang didukung oleh studi pustaka (bibliografis).

2. Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu entitas yang berfungsi sebagai karakteristik, atribut, atau ukuran yang dimiliki atau diperoleh oleh unit penelitian terkait dengan suatu konsep tertentu. Dalam penelitian ini, variabel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen, yang sering disebut sebagai variabel X, merupakan variabel yang diteliti untuk mengkaji pengaruhnya terhadap variabel lain dalam suatu penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari implementasi (X1) dan pengawasan (X2).

b. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen, yang juga dikenal sebagai variabel terikat, merujuk pada variabel yang diukur dalam suatu penelitian dan diharapkan dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam konteks penelitian, variabel ini merupakan hasil atau efek yang diamati sebagai respons terhadap manipulasi variabel lainnya. Analisis terhadap variabel dependen memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dan hubungan kausal dalam fenomena yang diteliti.

Variabel dependen (terikat), yang dikenal sebagai variabel Y, adalah variabel yang diprediksi akan muncul dalam konteks hubungan fungsional dengan, atau sebagai akibat dari, variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan review.

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merujuk pada penjabaran yang jelas dan terukur mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam studi ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel dapat diidentifikasi, diukur, dan dianalisis dengan konsisten. Penjelasan yang komprehensif mengenai definisi operasional ini akan memungkinkan peneliti dan pembaca untuk memahami konteks, tujuan, serta implikasi dari penelitian yang dilakukan.

Secara operasional, penjabaran indikator untuk masing-masing variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) merujuk pada penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang mencakup berbagai aspek, antara lain identifikasi, klasifikasi, serta pengendalian sistem. Tujuan dari serangkaian proses tersebut adalah untuk memastikan reliabilitas informasi keuangan dan akurasi pencatatan transaksi yang terjadi.
- b. Implementasi Pengawasan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) merupakan variabel yang diukur melalui sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengukuran ini mencakup aspek-aspek kegiatan pre-emptif, preventif, dan represif.
- c. Efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reuiv terhadap Laporan Keuangan Daerah (Y) merupakan variabel yang diukur melalui sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas tersebut. Pengukuran ini mencakup dua aspek penting, yaitu efektivitas dalam hal waktu pelaksanaan serta kualitas pelaksanaan reuiv.

4. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Cirebon, yang berjumlah 60 orang, pada bulan April tahun 2013.

Menurut Arikunto (2006), dalam konteks penelitian, apabila populasi yang diteliti memiliki jumlah kurang dari 100 individu, maka sebaiknya seluruh populasi tersebut diambil untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian populasi. Sebaliknya, jika jumlah populasi lebih dari 100 individu, peneliti dapat mengambil sampel sebesar 10–15% atau 20–25% dari jumlah populasi, tergantung pada kapasitas peneliti dalam memilih sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 60 orang.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kuesioner untuk mengukur implementasi, kuesioner untuk pengawasan, dan kuesioner untuk evaluasi efektivitas. Sebelum pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melaksanakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil evaluasi instrumen menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah valid dan ketiga kuesioner telah dinyatakan reliabel.

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

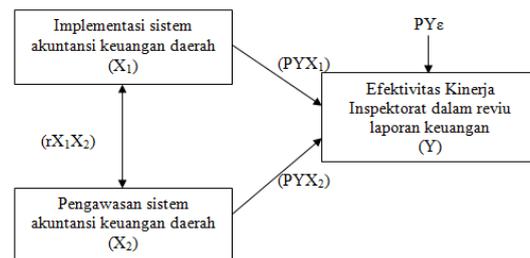
a. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup analisis rata-rata, deviasi standar, serta frekuensi minimum dan maksimum dari variabel-variabel yang sedang diteliti.

b. Analisis Jalur (*Pathway*)

REFORMASI Vol 5 No 1 Oktober 2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan dan pengawasan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reuiu laporan keuangan daerah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Pathway Analysis*). Model analisis jalur dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Uji Normalitas Sebaran

Hasil pengujian validitas secara komprehensif disajikan dalam tabel di bawah ini:

Sex		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ³			Shapiro-Wilk		
		Stats	df	Sig.	Stats	df	Sig.
Implementasi	M	.081	32	.200*	.957	32	.230
	W	.120	28	.200*	.967	28	.499
Pengawasan	M	.118	32	.200*	.926	32	.052
	W	.163	28	.056	.957	28	.293
Efektivitas	M	.133	32	.160	.852	32	.046
	W	.153	28	.092	.954	28	.247

M: Man

W: Woman

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel yang disajikan, hasil analisis menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa untuk kedua kelompok gender, yaitu pria dan wanita, nilai signifikansi atau probabilitas pada

variabel implementasi, pengawasan, dan efektivitas berada pada rentang 0,052 hingga 0,200, yang kesemuanya berada di atas ambang batas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh mengikuti distribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Dalam penelitian ini, pengujian homogenitas dilaksanakan dengan menerapkan uji Lavene, dan hasilnya disajikan secara lengkap sebagai berikut:

Test of Homogeneity of Variance					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Implementasi	Based on Mean	.704	1	58	.405
	Based on Median	.696	1	58	.408
	Based on Median and with adjusted df	.696	1	56.774	.408
	Based on trimmed mean	.700	1	58	.406
Pengawasan	Based on Mean	4.718	1	58	.051
	Based on Median	4.248	1	58	.054
	Based on Median and with adjusted df	4.248	1	46.469	.054
	Based on trimmed mean	4.220	1	58	.052
Efektivitas	Based on Mean	.438	1	58	.511
	Based on Median	.399	1	58	.530
	Based on Median and with adjusted df	.399	1	51.736	.530
	Based on trimmed mean	.361	1	58	.551

Berdasarkan analisis terhadap rata-rata (mean) nilai signifikansi atau probabilitas yang diperoleh, hasil menunjukkan nilai di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh memiliki sifat homogen, yang menunjukkan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang identik.

c. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengaruh implementasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reвью Laporan Keuangan Daerah, dengan penekanan khusus pada nilai R-squared yang ditunjukkan di bawah ini:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.701	.690	5.39494

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Tabel di atas secara komprehensif menggambarkan pengaruh variabel implementasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam melakukan tinjauan terhadap Laporan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel yang diteliti, digunakan pendekatan analisis varians (ANOVA) yang akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3887.974	2	1943.987	66.791	.000 ^a
	Residual	1659.009	57	29.105		
	Total	5546.983	59			

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Berdasarkan tabel di atas, $F_{hitung} (66,791) > F_{tabel} (3,187)$ dan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi dan pengawasan yang dilakukan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam menjalankan reвью Laporan Keuangan Daerah di Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2013.

Untuk menganalisis pengaruh implementasi secara parsial terhadap efektivitas kinerja inspektorat, digunakan Uji T. Selanjutnya, untuk mengukur magnitud pengaruh tersebut, diterapkan analisis koefisien Beta atau Koefisien Standar.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.601	5.111		5.400	.000
	IMPLEMENTASI	.346	.125	.344	2.773	.007
	PENGAWASAN	.403	.094	.534	4.310	.000

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Berdasarkan hasil analisa SPSS di atas, $t_{hitung} (2,002) > t_{tabel} (2,002)$ atau signifikansi $(0,029) < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan dari implementasi yang dilakukan secara parsial terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah. Besar skor pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 0,344, yang menunjukkan persentase sebesar 34,4%.

Berdasarkan hasil analisa SPSS di atas, $t_{hitung} (4,310) > t_{tabel} (2,002)$ atau signifikansi $(0,000) < 0,05$. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier yang signifikan antara pengawasan dan efektivitas kinerja inspektorat dalam mereviu Laporan Keuangan Daerah di Inspektorat Kabupaten Cirebon, dengan koefisien korelasi sebesar 0,534 atau 53,4%.

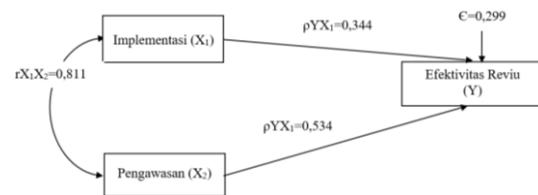
Dalam penelitian ini, analisis korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yang mencakup implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, serta pengawasan dan efektivitas kinerja inspektorat dalam melakukan tinjauan terhadap laporan keuangan daerah. Hasil analisis korelasi secara komprehensif disajikan sebagai berikut:

Correlations				
	EFEKTIVITAS	IMPLEMENTASI	PENGAWASAN	
Pearson Correlation	EFEKTIVITAS	1,000	,777	,813
	IMPLEMENTASI	,777	1,000	,811
	PENGAWASAN	,813	,811	1,000
Sig. (1-tailed)	EFEKTIVITAS	,000	,000	,000
	IMPLEMENTASI	,000	,000	,000
	PENGAWASAN	,000	,000	,000
N	EFEKTIVITAS	60	60	60
	IMPLEMENTASI	60	60	60
	PENGAWASAN	60	60	60

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa skor korelasi tertinggi terdapat pada variabel pengawasan dan efektivitas, yaitu sebesar 0,813. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Selain itu, korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan $0,000 < 0,05$. Skor korelasi REFORMASI Vol 5 No 1 Oktober 2020

sebesar 0,777 antara implementasi dan efektivitas menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan searah di antara kedua variabel tersebut. Di samping itu, korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan $0,000 < 0,05$. Skor korelasi antara implementasi dengan pengawasan sebesar 0,811 hal ini menunjukkan adanya korelasi yang cukup dan searah. Disamping itu korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, diagram jalur yang menggambarkan pengaruh dari implementasi, pengawasan, dan supervisi terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reviu Laporan Keuangan Daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Persamaan structural untuk diagram jalur diatas sebagai berikut:

$$Y = 0,777X_1 + 0,813X_2 + E$$

Di mana:

- Y = Efektivitas kinerja inspektorat
- Y = Besarnya pengaruh
- X₁ = Implementasi
- X₂ = Pengawasan

Besarnya pengaruh dapat dihitung sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Implementasi (X₁) terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah (Y):
 - a) Pengaruh langsung X₁

$$PYX_1 = PYX_1^2 \times 100\%$$

$$= (0,344)^2 \times 100\%$$

- $$= 0,118$$
- $$= 11,8\%$$
- b) Pengaruh tidak langsung X_1 melalui X_2
- $$\frac{PYX_1}{PYX_2} = \frac{(PYX_1)}{(rX_1X_2)} \times \frac{(PYX_2)}{(PYX_2)}$$
- $$= \frac{(0,344)}{x(0,811)} \times \frac{x(0,534)}{100\%}$$
- $$= 0,149 \times 100\%$$
- $$= 14,9\%$$
- c) Pengaruh total X_1
- $$= 11,8\% + 14,9\%$$
- $$= 26,7\%$$
- 2) Pengaruh Pengawasan (X_2) terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah (Y):
- a) Pengaruh langsung X_2
- $$PYX_2 = PYX_2^2 \times 100\%$$
- $$= 0,534^2 \times 100\%$$
- $$= 28,5\%$$
- b) Pengaruh tidak langsung X_2 melalui X_1
- $$\frac{PYX_2}{PYX_1} = \frac{(PYX_2)}{(rX_1X_2)} \times \frac{(PYX_1)}{(PYX_1)}$$
- $$= \frac{(0,534)}{(0,811)} \times \frac{(0,344)}{100\%}$$
- $$= 0,149 \times 100\%$$
- $$= 14,9\%$$
- c) Pengaruh total X_2
- $$= 28,5\% + 14,9\%$$
- $$= 43,4\%$$
- 3) Pengaruh x (Pengaruh X_1 , X_2 secara bersama sama);
- $$R^2_{X_1X_2} = 26,7\% + 43,4\%$$
- $$R^2_{X_1X_2} = 70,1\%$$
- 4) Pengaruh variabel lain.
- Prosentasi pengaruh variabel lain:
- $$= PYC \times 100\%$$
- $$= 0,299 \times 100\%$$
- $$= 29,9\%$$

Pembahasan

Pembahasan mengenai pengaruh serta pengawasan secara simultan terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam mereview Laporan Keuangan Daerah akan dimulai dengan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner mengenai variabel (Y), yaitu efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah.

Menurut Mustofa Kamal (2012:2), untuk mencapai tujuan dari proses reviu, yaitu untuk menjamin keandalan informasi serta mempertegas keyakinan yang bersifat terbatas, terdapat beberapa teknik yang dapat diterapkan. Teknik-teknik tersebut meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan, dan analisis, yang masing-masing mencakup berbagai jenis bukti, seperti bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis, dan bukti keterangan. Pelaksanaan kegiatan reviu laporan keuangan daerah hanya akan berlangsung secara efektif apabila seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan laporan keuangan daerah, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakefektifan dalam pelaksanaan review.

Berdasarkan hasil analisa SPSS di atas, $F_{hitung} (66,791) > F_{tabel} (3,187)$ dan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di

inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013.

Dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kondisi empiris yang berlaku di lapangan. Efektivitas kinerja inspektorat dalam mereview laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut adalah implementasi sistem akuntansi keuangan daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, yang menjadi fokus penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Terdapat hubungan linier antara pelaksanaan implementasi Sistem Akuntansi Daerah secara parsial dengan efektivitas kinerja Inspektorat dalam meninjau Laporan Keuangan Daerah di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada tahun 2013. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2,773) lebih besar daripada t_{tabel} (2,002), dengan tingkat signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$. Pengaruh dari implementasi terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam melakukan reвью terhadap Laporan Keuangan Daerah dapat diukur dengan koefisien sebesar 0,344, yang setara dengan 34,4%.
2. Ada hubungan linier antara pengawasan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial dengan efektivitas kinerja inspektorat dalam reвью Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dengan hasil analisis data diperoleh skor t_{hitung} (4,310) > t_{tabel} (2,002) atau signifikansi $(0,000) < 0,05$. Pengaruh implementasi terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reвью Laporan Keuangan Daerah 0,344 atau 34,4%.

3. Ada hubungan linier antara pengaruh dan pengawasan secara bersama-sama terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam reвью Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013, dimana F_{hitung} (66,791) > F_{tabel} (3,187) dan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ dengan koefisien determinasi sebesar 70,1.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, Omar, 2003, *How strategic performance management is helping companies create business value*, *Journal of Strategic Finance*, Vol: 84 Iss: 7, hal: 44.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi: 2, hal 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Baswir, Revrison, 2000, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi Tujuh, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM, Jokjakarta.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi: 3, Jakarta.
- Nur Arfiah, Nunuy. (2009). *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama. Penerbit Andi, Yogyakarta. 65
- Mustofa Kamal, 2012. *Sinergi Reвью dan Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sedarmayanti, 2008. Tata kerja dan produktivitas. Jakarta: Mandar Maju.
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, reviu Laporan Keuangan Daerah, Cetakan pertama, Tangerang.
- Sugiono, 2008, Metode penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Edisi Revisi, Cetakan ke16, Alfabeta, Bandung
- Suseno (2010). Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Fisip UI.